

EVOLUSI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM SEJARAH INDONESIA

Nurul Fajri *¹

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

nurul7711@guru.sd.belajar.id

Darul Ilmi

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

darulilm2023@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to explain the development of Islamic educational institutions through the challenging struggles of the Indonesian people throughout Indonesia's history. During the colonial period, the Dutch openly employed various methods to suppress Islamic education, which, at that time, took the form of Madrasah and Islamic boarding schools (pondok pesantren). This led to the emergence of a dichotomy referring to a significant division or difference between institutions of education recognized and supported by the Dutch colonial government, which tended to follow Western education systems, and traditional Islamic educational institutions such as pesantren and madrasah, which focused on Islamic education. The research method employed in this study is literature review, involving the collection of various sources on the development of Islamic educational institutions in Indonesia. The findings of this research can contribute to the literature on educational studies, particularly in the context of Islamic education. This information can serve as a reference for further research on the development of education in Indonesia. The results of the study indicate that Madrasah, as an Islamic educational institution in Indonesia, also underwent a long journey, with Dutch colonialism exerting pressure to weaken the education system in Madrasah.

Keywords: Evolution, Islamic educational institutions, history.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan lembaga pendidikan Islam melalui perjuangan bangsa Indonesia yang sangat berat sepanjang sejarah Indonesia. Dimasa kolonial secara terang-terangan Belanda melakukan berbagai cara agar pendidikan Islam yang pada saat itu berbuntut Madrasah dan pondok pesantren diberhentikan, sehingga pada saat itu muncul dikotomi yang merujuk pada pembagian atau perbedaan signifikan antara lembaga pendidikan yang diakui dan didukung oleh pemerintah kolonial Belanda, yang cenderung mengikuti sistem pendidikan barat, dengan lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan madrasah yang mengajarkan pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Manfaat penelitian ini dapat menjadi kontribusi pada literatur kajian pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Hasil dari penelitian bahwa Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia juga mengalami perjalanan yang panjang, Kolonialisme Belanda memberikan tekanan untuk melemahkan sistem pendidikan di Madrasah.

¹ Korespondensi Penulis

Kata Kunci: Evolusi, lembaga pendidikan Islam, sejarah.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam konteks Islam diawali dengan pentingnya pencarian ilmu, di mana Nabi Muhammad menekankan pentingnya menuntut ilmu karena itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Manusia. Didalam hadis-hadisnya, Nabi juga menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi mencakup pembentukan karakter, etika, dan moral. Hadis Nabi menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengembangkan sistem pendidikan yang holistik dan mencakup semua aspek kehidupan.

Kesuksesan Rasulullah SAW dalam mendidik tidak terbatas pada lingkup keluarganya, melainkan juga mencakup para sahabatnya. Nabi Muhammad menjadi teladan utama dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam, memberikan perhatian pribadi kepada setiap sahabat, dan menunjukkan konsistensi serta kesabaran dalam mendidik. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi bersifat holistik, mencakup aspek agama, karakter, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Pertimbangan individual, pendekatan berbasis pengalaman, dan pemahaman terhadap perbedaan individu merupakan strategi pendidikan yang berhasil diterapkan oleh Rasulullah, menciptakan para sahabat sebagai generasi yang memahami dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ajaran yang diajarkan oleh nabi Muhammad sehingga pada akhirnya, membentuk dasar kuat bagi kelangsungan dan penyebaran Islam.

Cikal bakal pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW dapat ditemukan di Suffah, suatu area terbuka di Masjid Nabawi. Di sana, Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran agama kepada para sahabat, terutama yang tinggal di sekitar Suffah. Pembelajaran tidak hanya terfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup etika, moralitas, dan prinsip-prinsip hidup Islam. Para sahabat yang berkumpul di Suffah menjadi mahasiswa pertama dalam sejarah Islam, menciptakan suatu lingkungan belajar yang intens dan mendalam. Dengan demikian, Suffah menjadi landasan awal bagi perkembangan pendidikan Islam, di mana nilai-nilai agama dan pengetahuan diteruskan dari Nabi kepada para sahabat, membentuk generasi pertama yang mendukung penyebaran dan kelangsungan ajaran Islam.

Seperti itulah sejarah awal kemajuan pendidikan yang berlangsung pada zaman Rasulullah hingga saat sekarang ini. Inti dari penelitian berpindah ke Indonesia, menyoroti perkembangan pendidikan Islam dalam lingkup yang lebih kecil. Mengakui pentingnya memahami dinamika dan evolusi lembaga pendidikan Islam di negeri ini. Tulisan mencerminkan tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam Indonesia, terutama akibat tekanan dari bangsa kolonial. Adanya upaya untuk mengakomodasi lembaga pendidikan Islam dalam kerangka kurikulum sekuler dan undang-undang pendidikan nasional menjadi bukti konkret bahwa perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia melibatkan perjuangan dalam mempertahankan identitas keislamannya. Dikotomi antara perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran dan bimbingan tokoh agama menjadi tema sentral dalam memahami perjalanan panjang lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Menyadari pentingnya dukungan legal-formal, pesantren dan madrasah berusaha memperoleh payung hukum pendidikan dari pemerintah Indonesia, sehingga eksistensi mereka mendapatkan legitimasi resmi. Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan pustaka, membahas sejarah lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Fokus penelitian adalah melacak perjalanan sejarah dan perjuangan pesantren serta madrasah pada masa penjajahan Belanda. Sebagai madrasah mereka terlibat dalam kompetisi yang sengit dengan lembaga pendidikan umum, menunjukkan dinamika perubahan dan adaptasi dalam menghadapi tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Lembaga Pendidikan Islam dalam Sejarah Indonesia

Lembaga pendidikan merupakan faktor penentu perubahan sosial, memiliki peran krusial dalam membentuk karakter generasi penerus yang kokoh dan siap mengemban tanggung jawab kepemimpinan bangsa. Pentingnya pendidikan membuatnya perlu dimaksimalkan dalam segala aspek. Untuk melaksanakan pendidikan secara efektif, diperlukan lembaga sebagai media atau forum. Lembaga pendidikan, seperti dijelaskan oleh (Rahman 2018), adalah institusi atau situasi tertentu yang memfasilitasi proses pembelajaran, baik yang bersifat terstruktur maupun tradisional. Seiring dengan perkembangan sejarah panjang lembaga pendidikan, terutama dalam konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dinamikanya terus berkembang untuk menemukan bentuk yang ideal.

Namun, pengertian lembaga pendidikan Islam sering kali tidak secara eksplisit dijabarkan dalam literatur kependidikan. (Suhada 2017) menyoroti bahwa kajian lembaga pendidikan Islam, atau tarbiyah Islamiyah, sering terintegrasi secara implisit dengan pembahasan mengenai berbagai jenis lembaga pendidikan. Meskipun begitu, kita memahami tentang suatu lembaga Islam dapat menciptakan masyarakat yang mengusung sifat-sifat mengamalkan ajaran Islam, menciptakan kondisi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam secara optimal. Sebagai suatu entitas, lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai wahana yang memastikan keberlanjutan nilai-nilai ke-Islaman dalam proses pendidikan.

Pendidikan Islam, awalnya hanya dianggap sebagai materi, mengalami perubahan konseptual menjadi institusi seiring waktu. Perubahan tersebut merupakan bentuk pengamalan UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur operasionalisasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, istilah "pendidikan Islam" dapat merangkum empat persepsi utama, yaitu: pertama, pendidikan Islam dalam arti materi; kedua, pendidikan Islam sebagai institusi; ketiga, pendidikan Islam sebagai bagian dari kultur; dan

keempat, pendidikan Islam sebagai pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Soebahar 2013).

Ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam sebagai institusi, kita merujuk pada lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan Madrasah sebagai sekolah umum dengan ciri khas Islam (Soebahar 2013). Pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, memegang peran strategis yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Posisinya yang penting tercermin dalam kontribusinya sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya menyediakan wadah pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai ke-Islaman dalam pendidikan.

Peran strategis pesantren dalam masyarakat Indonesia tetap menjadi kiblat bagi umat Islam, tercermin dalam keyakinan bahwa menuntut ilmu agama secara lebih mendalam dapat terwujud melalui pengalaman mondok di pesantren. Selain itu, pendidikan pesantren telah terbukti mampu memberikan pendidikan integratif dan komprehensif dengan menyatukan ilmu pengetahuan dan moralitas bagi para santri. Keunikan lainnya adalah pesantren tidak membatasi umur siswa, mengusung konsep pendidikan sepanjang hayat yang berlangsung selama satu hari penuh. Pendidikan di pesantren juga menekankan nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, dan akhlak baik sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Selain itu, aspek persaudaraan menjadi watak utama santri, terlihat dari kebersamaan mereka dalam lingkungan pesantren, di mana satu kamar bisa dihuni oleh banyak santri dan makan bersama dengan menu sederhana menjadi tradisi yang memperkuat rasa solidaritas di antara mereka.

Sejarah pendidikan di Jawa mengungkapkan bahwa sebelum Islam masuk, lembaga pendidikan Jawa kuno yang disebut pawiyatan sudah eksis dengan praktik kependidikan yang mirip dengan pesantren. Pawiyatan melibatkan figur Ki Ajar sebagai pengajar dan cantrik sebagai murid, yang tinggal dalam satu kompleks tempat terjadinya proses belajar mengajar. Melalui analogi dengan pawiyatan, dapat disimpulkan bahwa pesantren memiliki akar yang kuat diawal masuknya Islam di Indonesia terutama di daerah Jawa (La Moane, Rama, and Achruh 2023).

Ketika Islam masuk ke Indonesia, muncul kebutuhan akan perlengkapan/sarana pendidikan, dan kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan di pesantren pada dasarnya mengajarkan ilmu agama serta pembentukan karakter, sehingga maret yang diberikan berfokus pada nilai-nilai agama Islam. Kemudian agar mencapai tingkat kecerdasan tertentu, barulah diajarkan kitab terdahulu yang ddikelompokkan menjadi tahap awal, tahap pertengahan serta tahap akhir. Mahmud Yunus mengkategorikan pesantren pada tahap awal menjadi empat tingkatan: dasar, menengah, tinggi, dan takhassus. Meskipun sistem pendidikan pesantren masih bersifat tradisional, dengan metode sorogan, wetonan, dan hafalan, terdapat lima unsur pokok pesantren menurut Zamaksyari Dhofier: kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik (Zulmardi 2009).

Pesantren, pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan. Meskipun telah terjadi perkembangan zaman, fungsi dari lembaga berupa pesantren pada saat ini tidak mengalami perubahan. Peran ini berlanjut bahkan setelah kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada masa lalu pesantren cenderung tertutup dan

kurang dikenal secara nasional, pemimpin Indonesia pada periode 1935-1936 pernah berdiskusi tentang pesantren sebagai model pendidikan nasional, menunjukkan pertimbangan terhadap nilai budaya dan pendidikan pesantren.

Dalam evolusi berikutnya, pesantren mengalami dinamika yang membuatnya berkembang dari yang tradisional ke modern. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, terutama setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan-perubahan dalam dunia pesantren. Banyak pesantren telah menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman tersebut, meskipun demikian, masih ditemukan juga pesantren yang tetap bersifat konservatif (Rahman 2018).

Pada saat sekarang ini dimasa modernisasi, pesantren dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam konteks ini, pendapat Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa pesantren diwajibkan untuk memenuhi tuntutan hidup anak didiknya di masa depan, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan memberikan bekal kemampuan nyata melalui pendidikan pengetahuan umum yang memadai. Dalam era sekarang, pentingnya tersedianya pilihan jurusan sesuai dengan potensi individu anak didik diakui sebagai aspek yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan pesantren, menurut Madjid, adalah membentuk manusia yang memiliki kesadaran agama Islam sejati (La Moane, Rama, and Achruh 2023).

a. Pesantrean

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan, memiliki elemen-elemen pokok yang mencakup pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kiai. Beberapa bahkan hanya mengakui tiga unsur utama, yaitu kiai sebagai pendidik dan pengajar, santri sebagai pelajar, dan masjid sebagai tempat belajar (Daulay 2015). Keberadaan pondok dalam pesantren memiliki alasan penting, seperti menampung santri yang datang dari daerah jauh, lokasinya di desa yang tidak memiliki perumahan untuk santri, dan adanya hubungan timbal balik antara kiai dan santri, di mana santri menganggap kiai sebagai figur orang tua (Daulay 2015).

Pesantren pertama diketahui didirikan oleh salah satu Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pesantren ini memiliki makna sejarah yang penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah tokoh ulama yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Pesantren yang didirikannya tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama Islam, tetapi juga menjadi tempat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Inisiatif mendirikan pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim menciptakan landasan bagi tradisi pesantren yang terus berkembang di Indonesia, menjadi pusat pembelajaran agama dan kultural yang memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan keilmuan umat Islam di tanah air (Fadli 2012).

Berkembangnya pesantren seiring bertambahnya santri membawa perubahan pada bangunan pesantren, yang dengan dukungan masyarakat sekitar berkembang menjadi kampus atau kompleks. Tempat ini menjadi tempat para santri beribadah, mencari ilmu, dan berinteraksi dengan kiai sebagai tokoh sentral yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang kemudian melahirkan istilah "pondok pesantren," dengan pondok berarti

tempat tinggal dan pesantren merupakan penyantrian atau tempat proses menjadi santri (Soebahar 2013).

Sejarah panjang pesantren menunjukkan transformasinya dari lembaga yang sekadar menyebarkan ilmu menjadi institusi yang menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dan membentuk karakter. Pesantren juga menerima kurikulum pemerintah sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan zaman. Dalam perkembangannya, muncul model-model pondok pesantren, antara lain pondok pesantren modern yang terbuka terhadap perubahan dan menerima kurikulum negara, serta pesantren Salaf yang mempertahankan tradisi salafi dan konservatif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan (Soebahar 2013).

b. Madrasah

Madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam formal, menetapkan sistem pembelajaran yang terstruktur dengan guru, siswa, jadwal pelajaran, kurikulum, silabus, dan GBPP. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk kepribadian islami pada peserta didik. Sebagai institusi formal, madrasah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk karakter dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Dalam konteks sejarah, keberadaan madrasah merupakan perkembangan dari masjid, di mana proses pendidikan di masjid pada awalnya mencakup pendidik, peserta didik, materi, dan metode pembelajaran. Meskipun metode ini kurang sesuai dengan suasana ketenangan masjid, namun perkembangan lebih lanjut mengarah pada pembentukan madrasah sebagai institusi pendidikan keagamaan di Indonesia. Sejarah mencatat pendirian madrasah pertama di Sumatra pada masa penjajahan Belanda, dan kemudian berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia, melibatkan tokoh-tokoh agama dan ulama.

Perubahan sosial pada masa kemerdekaan mendorong pesantren untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. Pada awalnya, madrasah lebih bersifat otonom dan mengikuti orientasinya sendiri. Namun, dengan adanya SKB Tiga Menteri, madrasah mulai berintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Pengelolaan madrasah semakin meningkat dengan sistem manajerial, termasuk komponen kurikulum yang teratur dan ketatausahaan yang lengkap.

Dulu, madrasah hanya mengenal sistem klasikal dengan shiff (kelas) satu hingga belasan, namun seiring berjalannya waktu, pengelolaannya semakin meningkat dengan sistem manajerial madrasah. Kurikulum, ketatausahaan, dan sarana pendidikan semakin diperhatikan, menunjukkan upaya madrasah untuk mengembangkan dirinya. Madrasah juga mulai mengakomodasi kebijakan pemerintah, seperti MWB (Madrasah Wajib Belajar), yang membawa perubahan signifikan dalam struktur dan orientasi pendidikan madrasah.

Pada awal kemerdekaan, madrasah pada umumnya menolak campur tangan pemerintah, namun seiring berjalannya waktu dan adopsi SKB Tiga Menteri, madrasah mulai membuka diri terhadap berbagai perkembangan sosial dan adaptasi terhadap pola hidup masyarakat. Madrasah menjadi lebih terbuka terhadap perubahan, dan peningkatan kualitas serta

standarisasi kurikulum dengan sekolah dan madrasah negeri. Fenomena ini mencerminkan respons madrasah terhadap tuntutan perkembangan pendidikan di Indonesia.

SKB Tiga Menteri tahun 1975 menjadi tonggak penting dalam sejarah madrasah, mengharuskannya untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial dan pola hidup masyarakat. Legalisasi ini membawa madrasah untuk menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah negeri, bahkan memberikan opsi penegerian atau pemfilialan dengan sekolah negeri. Kesempatan ini membuka pintu bagi ujian persamaan negeri dan UUB (Ujian Umum Berstandar) di madrasah, yang semakin mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional.

Pemisahan Pendidikan yang Bersifat Keagamaan (Agama) Dan Pendidikan yang Bersifat Non-Keagamaan

Dalam bahasa Inggris, "dichotomy" mengacu pada pembagian dua bagian atau pembelahan dua, yang sering kali mencerminkan perbedaan atau pertentangan. Dikotomi dapat muncul dalam berbagai konteks, dan dalam konteks pendidikan di Indonesia, kita dapat melihat adanya dikotomi antara pendidikan Islam dan pendidikan sekular. Secara terminologis, dikotomi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pemisahan antara ilmu dan agama. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk dikotomi lainnya, seperti dikotomi antara ulama dan intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam, dan bahkan dikotomi dalam diri seorang Muslim (split personality). Menurut Al-Faruqi, dikotomi ini mencerminkan dualisme religius dan kultural.

Dikotomi antara pendidikan Islam dan sekular sangat kentara di Indonesia. Ini tercermin dalam lahirnya dua lembaga pendidikan dengan ciri khas berbeda, yaitu sekolah dan madrasah. Sekolah lebih menekankan pada pembelajaran umum, sementara madrasah lebih fokus pada pendidikan keislaman dengan proporsi materi agama yang lebih besar daripada materi umum dan sekular. Permasalahan dikotomi dan dualisme telah menjadi bagian integral dari sejarah pendidikan di Indonesia, dan akarnya dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda. Dikotomi ini muncul sebagai bentuk diskriminasi, di mana pendidikan untuk warga Belanda diselenggarakan secara eksklusif, sedangkan pendidikan untuk warga Indonesia cenderung tidak seimbang, lebih ditujukan untuk tujuan tertentu seperti pelayanan domestik.

Pada masa penjajahan Belanda, dikotomi ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan pendidikan tetapi juga merupakan bagian dari strategi penjajah untuk mempertahankan perbedaan sosial. Warga Belanda diberikan pendidikan yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan umum, sementara warga Indonesia diberikan pendidikan yang lebih terbatas, lebih menekankan peran sosial tertentu, dan tidak dirancang untuk meningkatkan taraf sosial secara keseluruhan.

Pembagian atau dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan pendidikan agama memiliki akar yang dalam dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, anak-anak yang berkesempatan masuk sekolah Belanda sangat terbatas, hanya sekitar 6% dan cenderung terbuka bagi anak-anak dari kalangan bangsawan dan saudagar. Akibatnya, anak-anak Muslim lebih memilih untuk menuntut ilmu di madrasah atau pondok pesantren yang telah ada sebelum

pendirian sekolah-sekolah resmi oleh pemerintah kolonial Belanda. Tekanan politik dari pemerintah kolonial menyebabkan sekolah-sekolah agama Islam memisahkan diri dan membentuk entitas tersendiri, menciptakan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama.

Dalam sejarah pendidikan Islam, Azyumardi Azra menyebut fenomena ini sebagai "kecelakaan sejarah" atau "historical accident." Hal ini terjadi ketika ilmu-ilmu umum yang berbasis pada penelitian empiris, rasio, dan logika dihadapi perlakuan kuat dari kalangan fuqaha. Seiring waktu, dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama semakin terpupuk dan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah menerapkan pengawasan yang sangat ketat terhadap pendidikan Islam. Mereka membentuk badan khusus, Priesntraden, yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Kontrol yang ketat ini diarahkan untuk menghambat dan bahkan menghalangi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Salah satu instrumen kontrol yang digunakan pemerintah Belanda adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mengharuskan guru agama memiliki surat izin dari pemerintah untuk dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Awalnya, kebijakan ini sangat ketat, tetapi seiring perkembangannya, persyaratan surat izin menjadi lebih terbuka. Perubahan ini mungkin dipengaruhi oleh munculnya gerakan organisasi pendidikan Islam seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdatul Watan, dan lainnya yang semakin berkembang.

Peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, seperti Ordonansi Sekolah Liar atau Wilde School Ordonantie, menjadi alat yang digunakan untuk memberantas madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberikan pelajaran yang tidak disetujui oleh pemerintah. Selain itu, peraturan ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menutup sekolah-sekolah yang dianggap melanggar aturan. Untuk mendukung kehidupan agama Kristen di Indonesia dan menjaga keberagaman di sekolah umum, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan netral agama, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antaragama dalam lingkungan pendidikan.

Dikotomi yang muncul pada masa penjajahan Belanda tetap bertahan bahkan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Departemen Agama kemudian muncul untuk mengarahkan madrasah agar tidak beroperasi secara terpisah dan harus mengikuti standar yang berlaku untuk sekolah umum. Upaya untuk mengatasi dikotomi lembaga pendidikan ini mencapai puncaknya pada tahun 1975, di mana menteri agama, menteri dalam negeri, dan menteri pendidikan sepakat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang bertujuan untuk menciptakan langkah-langkah konvergensi terhadap dikotomi lembaga pendidikan di Indonesia. SKB ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan harmoni dan keselarasan antara pendidikan umum dan agama di Indonesia.

Upaya menyatukan Pendidikan yang Bersifat Keagamaan (Agama) Dan Pendidikan yang Bersifat Non-Keagamaan

Pada awal 1970-an, terjadi peristiwa signifikan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan lembaga pendidikan agama Islam, terutama madrasah. Pada tahun 1972 dan 1974, Presiden Soeharto menerbitkan Keppres No 34/1972 dan Inpres No 15/1974. Kedua keputusan tersebut dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari sistem pendidikan nasional, memicu reaksi keras dari umat Islam. Keputusan ini menciptakan dikotomi antara madrasah dan pendidikan nasional. Reaksi terhadap langkah ini kemudian merespon dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada tahun 1975.

SKB tiga menteri tersebut, yang melibatkan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, bertujuan untuk meredam ketegangan dan mensejajarkan madrasah dengan sekolah umum. Melalui SKB ini, tingkatan madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs), setingkat SMP, dan Madrasah Aliyah (MA), setingkat SMA, diperkenalkan. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, namun dampaknya membawa masuknya konsep kesetaraan dan kesederajatan antara madrasah dengan sekolah, menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Dengan terbitnya SKB tiga Menteri, madrasah memasuki fase kesetaraan dan kesederajatan dengan sekolah umum. Ini mencerminkan upaya konvergensi untuk mengatasi dikotomi dan dualisme yang telah lama melingkupi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Meskipun mata pelajaran umum di madrasah meningkat, peran mata pelajaran agama tetap penting, menunjukkan komitmen pada pendidikan berbasis agama. Pergulatan antara sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan Islam terus berlangsung, tercermin dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diharapkan dapat mendekatkan berbagai kutub pendidikan yang dualistik dan dikotomis di Indonesia. Meskipun upaya-upaya ini dilakukan, paradigma dualisme dan dikotomi masih menjadi tantangan yang terus dihadapi dalam pengelolaan pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Evolusi lembaga pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan perjuangan bangsa dalam mempertahankan identitas keislamannya sepanjang sejarah, terutama dalam konteks perlawan terhadap tekanan kolonial Belanda. Dikotomi antara lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah kolonial, yang cenderung mengadopsi sistem pendidikan barat, dengan lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan madrasah, yang berfokus pada pendidikan Islam, menjadi tema sentral dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Sejarah madrasah dan pesantren mencerminkan perjalanan panjang dan perubahan dinamika pendidikan Islam di Indonesia, dari resistensi terhadap tekanan kolonial hingga upaya konvergensi pada masa kemerdekaan.

Pada awalnya, terdapat dikotomi antara pendidikan Islam dan sekuler, menciptakan dualisme dalam sistem pendidikan. Artikel juga menyoroti upaya untuk menyatukan lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan dan non-keagamaan melalui kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun 1975. SKB ini diinisiasi oleh tiga menteri, yaitu Menteri

Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, dengan tujuan meredam ketegangan dan mengharmoniskan madrasah dengan sekolah umum. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai kesetaraan dan kesederajatan antara lembaga pendidikan Islam dan sekuler, mengakhiri sebagian dari dikotomi historis yang melingkupi pendidikan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Daulay, Nurussakinah. 2015. *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*. Kencana.
- Fadli, Adi. 2012. "Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya." *El-Hikam* 5(1): 29–42.
- La Moane, Martono, Bahaking Rama, and Andi Achruh. 2023. "PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MASA AWAL HINGGA LAHIRNYA KERAJAAN ISLAM DI ACEH, LEMBAGA, DAN TOKOHNYA." *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1(1): 162–74.
- Rahman, Kholilur. 2018. "Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam* 2(1): 1–14.
- Soebahar, Abd Halim. 2013. *Modernisasi Pesantren: Transformasi Kepemimpinan Kiai Dan Sistem Pendidikan Pesantren*. Lkis Pelangi Aksara.
- Suhada, Suhada. 2017. "Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 13(1): 1–20.
- Zulmardi, Zulmardi. 2009. "Mahmud Yunus Dan Pemikirannya Dalam Pendidikan." *Ta'dib* 12(1).